

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 *Agency Theory*

Menurut Scott dan O'Brien (2019), "*agency theory is a branch of game theory, which studies the design of contracts between principal and agent that motivate the agent to work in the best interests of the principal*", yang artinya teori keagenan merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari kontrak yang terjalin antara *principal* dan agen yang memotivasi agen untuk bekerja demi kepentingan terbaik *principal*".

"Menurut Saragih (2018), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Praptika dan Rasmini (2016) dalam Gozali dan Harjanto (2020) mengemukakan *audit delay* mempunyai hubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, karena manfaat laporan keuangan menjadi berkurang apabila tidak disampaikan secara tepat waktu. Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara informasi yang ingin disajikan dengan pelaporan, apabila informasi tersebut tidak disampaikan tepat waktu mengakibatkan nilai dari informasi menjadi berkurang. Berkurangnya nilai informasi yang disampaikan kepada *principal* menimbulkan asimetri informasi. Dalam hal ini pihak agen mengetahui lebih banyak informasi *internal* perusahaan secara detail dibandingkan pihak *principal* yang mengetahui informasi perusahaan secara eksternal melalui hasil kinerja yang dibuat manajemen. Oleh karena itu, hal ini memerlukan ketepatan waktu mengurangi adanya asimetri informasi antara pihak agen atau manajemen dengan pihak *principal* atau pemegang saham, sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara transparan kepada *principal*

Bahasan *audit delay* berkaitan erat dengan *agency theory*, dimana perusahaan dapat meminta auditor untuk memeriksa lebih lanjut mengenai isi laporan keuangan perusahaan yang berperan penting dalam laporan keuangan pemeriksaan yang lebih

lanjut ini memerlukan waktu lebih dan akan mempengaruhi *audit delay*. Perusahaan membutuhkan *auditor* untuk mengaudit laporan keuangannya guna meminimalisir terjadinya masalah agensi dan informasi asimetris (Saragih, 2018).

2.2 Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2019) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.
2. Menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Weygandt, *et al.* (2019) menyatakan agar informasi keuangan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan, laporan keuangan harus relevan dan mencerminkan transaksi-transaksi aktual keuangan perusahaan. Relevan berarti informasi keuangan mampu membuat adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan. Menurut Weygandt, *et al.* (2019), terdapat dua prinsip pengukuran:

1. *Historical Cost Principle*

Historical Cost Principle menyatakan bahwa perusahaan mencatat aset pada biayanya. Hal ini berlaku tidak hanya pada saat membeli aset, tetapi juga pada saat seiring berjalannya waktu aset tersebut dimiliki oleh perusahaan.

2. *Fair Value Principle*

Fair value principle menyatakan bahwa aset dan liabilitas harus dicatat pada nilai wajarnya. Informasi nilai wajar ini memiliki informasi yang lebih relevan dibandingkan *historical cost principle* untuk tipe-tipe aset dan liabilitas tertentu.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

1. Aset;
2. Liabilitas;
3. Ekuitas;
4. Penghasilan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
5. Kontribusi dari dan kontribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan
6. Arus kas.

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan.

Di dalam laporan keuangan terdapat komponen-komponen laporan keuangan. Menurut IAI (2019) dalam PSAK 1, komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode

Laporan posisi keuangan mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut:

- a. Aset tetap;
- b. Properti investasi;
- c. Aset tak berwujud;
- d. Aset keuangan;
- e. Investasi yang dicatat menggunakan metode ekuitas;
- f. Aset biologis;
- g. Persediaan;
- h. Piutang usaha dan piutang lain;
- i. Kas dan setara kas;
- j. Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual;
- k. Utang usaha dan utang lain;
- l. Provisi;

- m. Liabilitas keuangan;
 - n. Liabilitas dan aset untuk pajak kini;
 - o. Liabilitas dan aset pajak tangguhan;
 - p. Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan;
 - q. Kepentingan nonpengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; dan
 - r. Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
- Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi, antara lain: pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas, dan beban pajak. Informasi yang disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif lain, yaitu:
- a. Pos-pos penghasilan komprehensif lain, yang diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai dengan SAK: tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi dan akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.
 - b. Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas, dipisahkan ke dalam bagian pos berdasarkan SAK: tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi dan akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
- Informasi yang terdapat di dalam laporan perubahan ekuitas terdiri dari:
- a. Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali;
 - b. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan restropektif atau penyajian kembali secara restropektif;
 - c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan

transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.

4. Laporan arus kas selama periode

Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, dan menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019) dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Karakteristik kualitatif fundamental

a. Relevansi

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi mungkin mampu membuat perbedaan dalam keputusan bahkan jika sebagian pengguna memilih untuk tidak mengambil keuntungan atas informasi tersebut atau telah menyadari informasi tersebut dari sumber lainnya. Informasi keuangan

mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori, atau keduanya. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai *input* yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil (*outcomes*) masa depan. Informasi keuangan memiliki nilai konfirmatori jika menyediakan umpan balik tentang (mengkonfirmasi atau mengubah) evaluasi sebelumnya.

b. Materialitas

Informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan tersebut, yang memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu. Dengan kata lain, materialitas adalah aspek relevansi yang spesifik untuk suatu entitas tertentu berdasarkan sifat atau besarnya, atau keduanya, dari pos-pos di mana informasi tersebut berhubungan dalam konteks laporan keuangan masing-masing entitas. Oleh karena itu, DSAK IAI tidak dapat menetapkan suatu batas kuantitatif yang sama untuk materialitas atau menentukan apa yang dapat menjadi material dalam situasi tertentu.

c. Representasi tepat

Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus merepresentasikan secara tepat substansi dari fenomena yang akan direpresentasikan. Agar dapat menunjukkan representasi tepat dengan sempurna, tiga karakteristik harus dimiliki yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Penggambaran lengkap mencakup seluruh informasi yang diperlukan pengguna agar dapat memahami fenomena yang digambarkan. Penggambaran netral adalah tanpa bias dalam pemilihan atau penyajian informasi keuangan. Penjabaran netral tidak diarahkan, dibotkan, ditekankan, dibatalkan penekanannya, atau dengan kata lain dimanipulasi

untuk meningkatkan kemungkinan bahwa informasi keuangan akan diterima lebih baik oleh pengguna.

2. Karakteristik kualitatif peningkat

a. Keterbandingan

Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dalam, dan perbedaan antara, pos-pos. Keterbandingan tidak berhubungan dengan satu pos. Sebuah perbandingan mensyaratkan paling tidak dua pos. Keterbandingan bukan berarti seragam. Agar informasi dapat dibandingkan, hal yang serupa harus terlihat serupa dan hal yang berbeda harus terlihat berbeda. Keterbandingan informasi keuangan tidak akan meningkat dengan membuat pos-pos berbeda terlihat serupa dan juga tidak dapat meningkat karena membuat pos-pos serupa menjadi terlihat berbeda.

b. Keterverifikasian

Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi merepresentasikan fenomena ekonomik secara tepat sebagaimana mestinya. Keterverifikasian berarti bahwa berbagai pengobservasi independen dengan pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai konsensus, meskipun tidak selalu mencapai kesepakatan, bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi tepat.

c. Ketepatanwaktuan

Ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat memengaruhi keputusan mereka. Secara umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut. Akan tetapi, beberapa informasi dapat terus tepat waktu bahkan dalam jangka panjang setelah akhir dari periode pelaporan.

d. Keterpahaman

Pengklasifikasian, pengarakteristikan dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas dapat membuat informasi tersebut terpaham.

Menurut Weygandt, *et al.* (2019), terdapat dua pengguna informasi keuangan:

1. Pengguna *Internal*

Pengguna *internal* informasi akuntansi adalah manajer yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis. Pengguna internal termasuk di dalamnya manajer pemasaran, supervisi produksi, direktur keuangan, dan karyawan perusahaan.

2. Pengguna eksternal

Pengguna eksternal adalah individu atau organisasi yang berasal dari luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan perusahaan. Pengguna eksternal yang paling umum adalah *investor* dan kreditor. *Investor* menggunakan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan apakah harus membeli, mempertahankan, atau menjual kepemilikan atas saham perusahaan. Kreditor (seperti pemasok dan *banker*) menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi risiko atas pemberian kredit atau peminjaman dana.

2.3 Audit

Menurut Arens, *et al.* (2020) audit adalah proses pengumpulan bukti mengenai informasi untuk menentukan atau melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2021) dalam Standar Audit (SA) 200, tujuan suatu *audit* adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh *auditor* tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam hal kebanyakan kerangka bertujuan umum, opini tersebut adalah tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka tersebut.

Arens, *et al.* (2020) mengemukakan dalam melakukan audit, harus terdapat informasi yang dapat diketahui kebenarannya dan standar-standar yang informasinya dapat dievaluasi oleh auditor. Dalam menentukan apakah informasi dalam laporan yang diaudit dinyatakan sesuai dengan standar-standar yang ada maka diperlukan bukti audit. Bukti audit dapat diperoleh dengan cara mengambil

data elektornik dan dokumentasi dari seluruh transaksi, komunikasi baik tertulis dan elektronik dengan pihak eksternal, observasi yang dilakukan auditor, dan kesaksian lisan yang diberikan klien.

Menurut IAPI (2021) dalam SA 200, dalam pelaksanaan suatu *audit* atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan auditor adalah:

1. Memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan *auditor* untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; dan
2. Melaporkan atas laporan keuangan dan mengomunikasikannya sebagaimana yang diharuskan dalam SA, berdasarkan temuan *auditor*.

Auditor harus merupakan seseorang yang berpengalaman agar dapat memahami standar-standar yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui tipe dan jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan dengan tujuan pemberian opini dan kesimpulan setelah menguji seluruh bukti audit. Seorang auditor juga harus menjaga independensi tingkat tinggi untuk menjaga kerahasiaan dan informasi pribadi klien atas laporan (Arens, *et al.*, 2020).

Menurut Arens, *et al.* (2020) terdapat 3 (tiga) tipe audit, yaitu

1. *Operational Audit*

Operational audit mengevaluasi keefisienan dan keefektifitasan prosedur dan metode operasional di dalam suatu perusahaan. Manajemen mengharapkan adanya rekomendasi sebagai dasar dalam pengembangan dalam operasi. Di dalam *operational audit*, evaluasi auditor tidak terbatas dalam laporan keuangan. Auditor dapat mengevaluasi struktur organisasi, pengoperasian komputer, metode produksi, *marketing*, dan area-area yang dikuasai oleh auditor.

2. *Compliance Audit*

Compliance audit dilakukan untuk menentukan apakah klien mengikuti prosedur-prosedur tertentu, aturan, dan regulasi yang ditetapkan oleh seseorang dengan otoritas yang lebih tinggi.

3. *Financial Statement Audit*

Financial statement audit dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan dinyatakan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam menentukan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, auditor mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan apakah pernyataan mengandung kesalahan material atau salah saji.

Menurut Hery (2019), auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup guna mendukung semua asersi manajemen yang terkait dengan laporan keuangan. Dalam hal ini, auditor perlu memutuskan tujuan audit secara tepat dan mengumpulkan bukti untuk memenuhi tujuan audit tersebut. Auditor biasanya akan mengikuti suatu proses audit untuk memastikan bahwa bukti yang diperoleh sudah mencukupi dan tepat, serta bahwa semua tujuan audit sudah ditetapkan dan dipenuhi. Proses audit tersebut terdiri dari empat fase, yaitu:

1. Merencanakan dan Merancang Pendekatan Audit

Dalam merencanakan dan merancang pendekatan audit, auditor perlu:

a. Memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungan klien

Agar dapat menilai dengan layak risiko salah saji dalam laporan keuangan, auditor harus mempunyai pemahaman yang menyeluruh atas bisnis klien dan lingkungan terkait, termasuk pemahaman atas perlakuan akuntansi yang unik dari industri klien.

b. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian

Risiko salah saji dalam laporan keuangan akan dapat diminimalisir apabila klien memiliki pengendalian yang efektif. Jika pengendalian internal dianggap efektif, risiko pengendalian yang ditetapkan dapat dikurangi dan jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan secara signifikan dapat menjadi lebih sedikit dibanding dengan pengendalian *internal* yang tidak memadai.

c. Menilai risiko salah saji yang material

Auditor menggunakan pemahamannya atas industri dan strategi bisnis, serta keefektifan pengendalian internal klien untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan klien. Risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, yang disebabkan oleh kecurangan, juga merupakan bagian dari risiko audit dan memerlukan penilaian oleh auditor secara khusus atas risiko tersebut.

2. Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantive atas transaksi
Pengujian pengendalian adalah suatu prosedur audit yang dilakukan auditor untuk menentukan efektivitas rancangan dan penerapan pengendalian internal oleh klien. Pengujian pengendalian ini dapat memberikan bukti tentang apakah kebijakan dan prosedur pengendalian telah diterapkan secara konsisten. Auditor juga mengevaluasi pencatatan transaksi dengan memverifikasi jumlah moneter transaksi. Prosedur audit ini disebut sebagai pengujian substantif atas transaksi. Pengujian ini bertujuan untuk mengungkapkan kekeliruan atau salah saji moneter dalam pencatatan dan pelaporan transaksi.
3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo
Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya tampak wajar atau rasional. Pengujian atas rincian saldo merupakan prosedur audit yang dilakukan auditor untuk menguji salah saji moneter atas saldo akhir akun dalam laporan keuangan.
4. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit
Setelah menyelesaikan semua prosedur, auditor harus menggabungkan informasi yang diperoleh guna mencapai kesimpulan menyeluruh tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Proses yang subjektif ini sangat mengandalkan pada pertimbangan professional auditor.

Menurut Arens, *et al.* (2020), terdapat 8 (delapan) bagian yang ada di dalam laporan audit:

1. *Report title*

Standar audit mengharuskan laporan audit untuk diberi judul dan judul harus mengandung kata 'independen'. Penggunaan kata independen ini mampu menunjukkan bagi pengguna bahwa audit tidak memihak dalam seluruh aspek.

2. *Audit report address*

Laporan audit pada umumnya ditujukan untuk pihak dimana laporan tersebut disediakan seperti perusahaan, para pemegang saham, dan dewan direksi.

3. *Introductory paragraph*

Paragraf pertama di dalam laporan berisikan nama KAP yang melakukan audit. Paragraf pertama juga berisi laporan keuangan yang diaudit, termasuk catatan atas laporan keuangan, tanggal yang tertera pada neraca, dan periode akuntansi yang terdapat di laporan laba rugi dan laporan arus kas.

4. *Management's responsibility*

Paragraf ini menyatakan tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan. Tanggung jawab manajemen termasuk menggunakan standar akuntansi yang sesuai dan memelihara pengendalian internal atas pelaporan keuangan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material yang disebabkan *fraud* atau *error*.

5. *Auditor's responsibility*

Paragraf ini menjabarkan tanggung jawab auditor. Paragraf pertama menunjukkan opini terhadap laporan keuangan dan audit diadakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Paragraf ini mencatat bahwa audit dirancang untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Paragraf kedua mendeskripsikan lingkup audit dan bukti audit yang terkumpul mengenai jumlah dan pengungkapan terhadap laporan keuangan.

6. *Opinion paragraph*

Paragraf ini berisikan kesimpulan yang diberikan auditor berdasarkan hasil audit.

7. *Signature and address of CPA firm*

Tanda tangan menunjukkan KAP atau praktisi yang melakukan audit. Pada umumnya, yang digunakan adalah nama KAP karena keseluruhan KAP memiliki tanggung jawab hukum dan *professional* untuk memastikan bahwa kualitas audit telah memenuhi standar. Kota dan negara KAP tersebut juga harus diikutsertakan.

8. *Audit report date*

Tanggal yang tertera di laporan adalah tanggal auditor menyelesaikan prosedur audit yang dilakukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat.

Hery (2019) mengemukakan bahwa secara umum, keandalan bukti audit sangat tergantung pada:

1. Interpendensi penyedia bukti

Bukti yang diperoleh dari pihak ke tiga atau pihak yang berada di luar klien (bukti eksternal) tentu saja lebih dapat diandalkan dibanding dengan bukti yang berasal dari atau yang dibuat oleh klien sendiri (bukti internal).

2. Efektivitas pengendalian internal klien

Bukti audit akan menjadi lebih dapat diandalkan jika pengendalian internal diterapkan secara efektif oleh klien.

3. Perolehan secara langsung oleh auditor

Bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, pengamatan, penghitungan ulang, dan inspeksi akan lebih dapat diandalkan dibanding dengan bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung.

4. Kualifikasi penyedia informasi dan juga auditor

Meskipun penyedia informasi adalah pihak yang independen, namun bukti audit akan menjadi tidak dapat diandalkan jika penyedia informasi tersebut tidak memiliki pemahaman mengenai arti pentingnya bukti tersebut.

5. Objektivitas

Bukti yang objektif lebih dapat diandalkan dibanding dengan bukti yang memerlukan pertimbangan tertentu.

6. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu bukti audit berkaitan dengan kapan bukti tersebut dikumpulkan serta bagaimana menentukan tanggal sampel. Untuk akun-akun laporan posisi keuangan, ketepatan waktu bukti audit berkaitan dengan kapan bukti tersebut dikumpulkan, sedangkan untuk akun-akun laporan laba rugi komprehensif, ketepatan waktu bukti audit berkaitan dengan pemilihan tanggal sampel atau penentuan bagian periode yang akan diaudit.

Menurut Hery (2019) dalam memutuskan prosedur audit mana yang akan digunakan, auditor dapat memilihnya dari delapan jenis bukti audit berikut:

1. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik merupakan cara langsung untuk memverifikasi apakah suatu aset benar-benar ada (tujuan eksistensi), dan pada tingkat tertentu apakah aset yang ada tersebut telah dicatat (tujuan kelengkapan). Pada umumnya, pemeriksaan fisik adalah cara yang objektif untuk mengetahui kuantitas maupun deskripsi aset. Selain itu, penilaian dan alokasi yang tepat untuk tujuan pelaporan keuangan juga tidak dapat diuji oleh pemeriksaan fisik (tujuan keakuratan).

2. Konfirmasi

Konfirmasi adalah proses untuk mendapatkan respon (tertulis atau lisan) dari pihak ke tiga sebagai jawaban atas suatu permintaan informasi tentang unsur tertentu yang berkaitan dengan asersi manajemen dan tujuan audit. Proses konfirmasi mencakup pemilihan unsur yang akan dimintakan konfirmasi, perancangan atas isi permintaan konfirmasi, pengkomunikasian permintaan konfirmasi kepada pihak ke tiga, dan penilaian terhadap informasi atau tidak adanya informasi yang disediakan oleh pihak ke tiga mengenai tujuan audit termasuk keandalan informasi tersebut. Konfirmasi dilaksanakan untuk memperoleh bukti dari pihak ke tiga mengenai asersi laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pemeriksaan atau penyelidikan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan.

4. Prosedur analitis

Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya tampak wajar atau rasional. Pada umumnya, prosedur analitis dapat digunakan untuk tujuan memahami industri

dan bisnis klien, menilai kesinambungan usaha klien, menunjukkan adanya kemungkinan salah saji, dan mengurangi pengujian audit yang terinci.

5. Wawancara dengan klien

Wawancara dengan klien merupakan suatu upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai bentuk respon atas pertanyaan yang diajukan auditor.

6. Penghitungan ulang

Pengecekan ulang ini merupakan pengujian atas keakuratan hasil perhitungan klien.

7. Observasi

Penggunaan alat indera untuk menilai aktivitas klien.

Menurut Arens, *et al.* (2020), terdapat 3 (tiga) tingkat materialitas:

1. *Immaterial*

Salah saji yang terdapat di dalam laporan keuangan tidak mempengaruhi keputusan dari pengguna yang berkaitan.

2. *Material*

Terdapat salah saji di dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna tetapi secara keseluruhan laporan keuangan masih disajikan secara wajar dan bermanfaat.

3. *Highly material*

Seluruh keputusan pengguna berdasarkan laporan keuangan akan terpengaruhi secara signifikan dan pengguna mungkin membuat keputusan yang salah berdasarkan laporan keuangan.

Menurut Arens, *et al.* (2020) terdapat 4 risiko audit, yaitu:

1. *Planned Detection Risk*

Planned detection risk adalah risiko bahwa bukti audit untuk suatu tujuan audit akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kinerja.

2. *Inherent Risk*

Inherent risk mengukur penilaian auditor atas kerentanan dari asersi salah saji material, sebelum mempertimbangkan keefektifitasan *internal control*. *Internal control* diabaikan dalam *inherent risk* karena dianggap terpisah di dalam model risiko audit sebagai risiko pengendalian.

3. *Control risk*

Control risk mengukur penilaian auditor terhadap risiko bahwa salah saji material dapat muncul dalam asersi dan tidak dicegah dan dideteksi tepat waktu oleh *internal control* klien.

4. *Acceptable Audit Risk*

Acceptable audit risk adalah pengukuran seberapa bersedia auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengalami salah saji material setelah proses audit selesai dan opini audit wajar tanpa pengecualian telah diterbitkan.

Arens, *et al.* (2020) menyatakan sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menyediakan manajemen dengan jaminan yang layak dimana perusahaan mencapai tujuannya. Kebijakan dan prosedur ini biasanya disebut pengendalian, dan secara kolektif membuat sistem pengendalian internal perusahaan. Pada umumnya, manajemen memiliki 3 (tiga) tujuan dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif:

1. *Reliability of reporting*. Tujuan ini berkaitan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal dan juga pelaporan non-keuangan. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum dan profesional untuk memastikan bahwa informasi disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.
2. *Efficiency and effectiveness of operations*. Pengendalian di dalam perusahaan mendorong penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif untuk mengoptimalkan tujuan perusahaan. Tujuan penting dari kontrol ini adalah informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk pengambilan keputusan.
3. *Compliance with laws and regulations*. Perusahaan publik, non-publik, dan non-profit diharuskan untuk mengikuti aturan dan hukum yang berlaku baik itu

berhubungan dengan akuntansi maupun tidak berhubungan. Contohnya seperti, kebijakan pajak penghasilan, perlindungan lingkungan, dan hak sipil.

Menurut Arens, *et al.* (2020), prinsip *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* berlaku untuk seluruh bentuk perusahaan dan untuk seluruh tujuan pengendalian internal. *COSO* terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

1. *Control Environment*

Control environment terdiri atas aksi, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan kinerja manajemen puncak, direktur, dan pemilik entitas mengenai pengendalian *internal* dan pentingnya bagi entitas. Untuk memahami dan menilai pengendalian lingkungan, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian, yaitu:

a. *Integrity and Ethical Value*

Integritas dan nilai etika merupakan hasil dari etika perusahaan dan standar perilaku, dan bagaimana mereka diterapkan di dalam perusahaan. Hal ini meliputi tindakan manajemen untuk menghapus atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin mendorong individu untuk melakukan tindakan tidak jujur. Integritas dan nilai etika meliputi komunikasi nilai-nilai yang terdapat dalam perusahaan dan standar perilaku melalui kebijakan dan kode etik. Manajemen melalui aktivitasnya memberikan sinyal yang jelas kepada karyawan akan pentingnya sistem pengendalian *internal*.

b. *Board of Director of Audit Committee Participation*

Dewan direksi memiliki peran yang sangat penting untuk tata kelola perusahaan yang efektif karena dewan direksi memiliki tanggung jawab pokok untuk memastikan bahwa manajemen mengimplementasikan sistem pengendalian *internal* dan pelaporan keuangan yang sesuai. Dewan direksi yang efektif tidak bergantung pada manajemen dan anggotanya tetap terlibat dan mengamati aktivitas manajemen. Meskipun dewan direksi mendelegasikan tanggung jawab pengendalian *internal* kepada manajemen,

dewan direksi tetap harus melaksanakan pengawasan terhadap perancangan dan kinerja pengawasan.

c. *Organizational Structure*

Struktur organisasi perusahaan menggambarkan tanggung jawab dan otoritas yang terdapat di dalam perusahaan saat ini. Struktur organisasi dapat terdiri dari tingkatan entitas, divisi, unit operasi, dan fungsi dalam unit, dan pengendalian yang beroperasi di masing-masing tingkatan. Dengan memahami struktur organisasi perusahaan, auditor dapat mempelajari manajemen dan elemen fungsional bisnis dan melihat bagaimana pengendalian diterapkan.

d. *Commitment to Competence*

Kompetensi merupakan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. *Commitment to competence* meliputi pertimbangan perusahaan dalam tingkatan kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut menerjemahkan ke dalam keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan.

e. *Accountability*

Manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab atas mengkomunikasikan harapan dan meminta pertanggungjawaban individu atas pekerjaan sistem pengendalian internal. Keefektifan dari proses ini bergantung ada subkomponen lainnya.

2. *Risk Assessment*

Penilaian risiko melibatkan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Empat prinsip yang mendasari penilaian risiko adalah perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas agar mampu mengidentifikasi dan menilai risiko terkait tujuan yang ingin dicapai, mampu menentukan bagaimana risiko dikendalikan, mampu mempertimbangkan potensi perilaku kecurangan, dan mampu mengawasi perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal. Penilaian risiko yang secara khusus berhubungan dengan pelaporan keuangan

melibatkan identifikasi dan analisis manajemen atas risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3. *Control Activities*

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk mengatasi risiko terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Terdapat 3 prinsip yang mendasari aktivitas pengendalian, yaitu mengembangkan aktivitas pengendalian yang mengurangi risiko hingga tingkat yang dapat diterima, mengembangkan pengendalian secara umum atas teknologi, dan membentuk kebijakan, prosedur, dan harapan yang sesuai. Aktivitas pengendalian dibagi menjadi 5 (lima) tipe, yaitu:

a. *Adequate Separation of Duties*

Pemisahan asset penitipan dengan bagian *accounting*, untuk melindungi perusahaan dari penggelapan, seseorang yang memiliki *custody* baik secara sementara atau permanen atas aset tidak diperbolehkan untuk memperhitungkan aset tersebut. Pemisahan otorisasi transaksi dengan penitipan aset terkait, hal ini diperlukan untuk mencegah seseorang yang mengotorisasi transaksi atas kepemilikan pengendalian aset terkait, untuk mengurangi kemungkinan adanya penggelapan. Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pencatatan, untuk memastikan bahwa informasi tidak *bias*, pencatatan pada umumnya merupakan tanggung jawab departemen yang berbeda yang melapor ke pengawas. Pemisahan tugas IT dengan departemen pengguna, dengan tingkat kerumitan yang meningkat, pemisahan otorisasi, pencatatan, dan *custody* menjadi tidak ada batasan.

b. *Proper Authorization of Transactions and Activities*

Setiap transaksi harus diotorisasi dengan tepat apabila ingin hasil pengendalian internal memuaskan. Dengan otorisasi umum, manajemen membentuk kebijakan dan bawahan diinstruksikan untuk mengimplementasikan otorisasi umum dengan menyetujui seluruh transaksi dalam *limit* yang telah ditentukan di dalam kebijakan. Otorisasi umum meliputi penerbitan harga tetap untuk penjualan produk, limit kredit untuk

pelanggan, dan titik pemesanan ulang tetap untuk melakukan akuisisi. Otorisasi spesifik diberlakukan untuk transaksi individual.

c. *Adequate Documents and Records*

Dokumen dan catatan merupakan catatan atas transaksi yang dimasukkan dan diringkas. Hal ini meliputi berbagai *item* yang beragam yakni *invoice* penjualan, *purchase orders*, pencatatan anak perusahaan, jurnal penjualan, dan laporan waktu karyawan. Banyak dari dokumen ini dicatat secara komputerisasi dibandingkan dengan kertas. Dokumen yang memadai diperlukan untuk pencatatan yang sesuai terkait transaksi dan pengendalian atas aset.

d. *Physical Control Over Assets and Records*

Untuk mempertahankan pengendalian internal yang memadai, aset dan pencatatan harus dilindungi. Aset mungkin saja dicuri apabila tidak dilindungi. Pencatatan mungkin saja dicuri, rusak, hancur, atau hilang yang dapat menghambat proses akuntansi dan operasi bisnis apabila tidak dilindungi. Ketika perusahaan terkomputerisasi, perlengkapan komputer, program, dan data yang berisi seluruh pencatatan harus dilindungi.

e. *Independent Checks on Performance*

Kebutuhan akan pemeriksaan independen meningkat karena pengendalian internal cenderung mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Individu cenderung lupa atau melakukan kegagalan dengan sengaja untuk mengikuti prosedur yang ada, atau mereka menjadi tidak peduli kecuali seseorang mengobservasi dan mengevaluasi kinerja mereka. Terlepas dari kualitas kontrolnya, seseorang dapat melakukan kesalahan atau melakukan kecurangan.

4. *Information and Communication*

Tujuan dari sistem informasi akuntansi dan komunikasi perusahaan adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi perusahaan dan untuk menjaga akuntabilitas aset-aset terkait. Prinsip yang menjadi dasar informasi dan komunikasi menekankan pada pentingnya menggunakan informasi yang memiliki kualitas dan relevan yang dikomunikasikan baik

secara internal maupun eksternal sebagai kebutuhan untuk mendukung fungsi yang tepat untuk pengendalian internal.

5. *Monitoring*

Aktivitas pengawasan berkaitan dengan penilaian berkelanjutan atau berkala atas kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian beroperasi sebagaimana dimaksud dan dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Prinsip yang mendasari pengawasan meliputi pemberlakuan evaluasi secara berkala dan mengkomunikasikan setiap kekurangan yang teridentifikasi kepada pihak-pihak yang tepat yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki kekurangan tersebut.

2.4 Audit Delay

Menurut Agoes (2016) dalam Harjanto (2017), pada akhir pemeriksaannya, dalam suatu pemeriksaan umum (*general audit*) KAP akan memberikan suatu laporan akuntan. Tanggal laporan akuntan harus sama dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan dan tanggal surat pernyataan langganan, karena menunjukkan sampai tanggal berapa akuntan bertanggungjawab untuk menjelaskan hal-hal penting yang terjadi.

Audit delay adalah periode waktu dari tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan sampai tanggal terbitnya laporan *auditor* independen. Prameswari dan Yustrianthe (2015) dalam Gozali dan Harjanto (2020) menyatakan *audit delay* adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan *audit* laporan keuangan tahunan yang diukur berdasarkan lamanya waktu atau hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan sampai tanggal yang tertera pada laporan *auditor* independen.

Audit delay mempunyai hubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, karena manfaat laporan keuangan menjadi berkurang apabila

tidak disampaikan tepat waktu (Saragih, 2018). Puspitasari dan Sari (2012) dalam Agustin, *et al.* (2018) menyatakan *audit delay* yang melewati batas waktu ketentuan akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Menurut Gozali dan Harjanto (2020), keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian *audit*. Menurut Prabandari (2021), ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat memberikan informasi yang relevan bagi para penggunanya.

Menurut Trianto (2006) dalam Fanny, *et al.* (2019), standar pekerjaan lapangan memuat pernyataan bahwa *audit* harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai. Hal ini yang kadang menyebabkan lamanya suatu proses pengauditan dilakukan, sehingga publikasi laporan keuangan yang diharapkan secepat mungkin menjadi terlambat. Dalam proses *audit*, *auditor* mungkin saja menemukan hambatan yang dapat memperpanjang proses *audit*.

Menurut Messier, *et al.* (2021), *auditor* harus memodifikasi keseluruhan strategi dan perencanaan *audit* seperlunya apabila kondisi berubah selama proses *audit* berlangsung. Langkah-langkah tambahan yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Menetapkan risiko bisnis.
2. Menetapkan materialitas.
3. Mempertimbangkan banyaknya lokasi.
4. Menilai kebutuhan spesialis.
5. Mempertimbangkan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan.
6. Mengidentifikasi pihak-pihak terkait.
7. Mempertimbangkan jasa yang memiliki nilai tambah.
8. Mencatat keseluruhan strategi *audit*, perencanaan *audit*, dan mempersiapkan program *audit*.

Menurut Messier, *et al.* (2019), evaluasi akhir atas bukti dari *audit* atas laporan keuangan berkaitan dengan dua isu, yaitu:

1. Kecukupan akan bukti *audit*.
2. Dampak atas terdeteksinya salah saji di dalam laporan keuangan.

Dalam mengevaluasi bukti *audit*, *auditor* menentukan apakah ada bukti yang cukup untuk mendukung setiap pernyataan dalam laporan keuangan yang relevan. Evaluasi ini mempertimbangkan bukti yang diperoleh untuk mendukung penilaian salah saji yang material, serta sebagai bukti yang dikumpulkan untuk mencapai tingkat resiko deteksi yang direncanakan (prosedur substantif). Apabila evaluasi menunjukkan bahwa bukti secara keseluruhan tidak cukup untuk tingkat resiko *audit* yang telah direncanakan, maka *auditor* mungkin perlu mengumpulkan bukti tambahan (Messier, *et al.*, 2019).

Knechel dan Payne (2001) dalam Sambuaga dan Santoso (2020), membagi tiga komponen *audit delay*, dimana:

1. *Scheduling lag* adalah selisih waktu antara akhir tahun fiskal atau tanggal neraca perusahaan hingga dimulainya pekerjaan lapangan oleh auditor.
2. *Fieldwork lag* adalah selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan auditor hingga saat penyelesaiannya.
3. *Reporting lag* adalah selisih waktu antara penyelesaian pekerjaan lapangan auditor hingga terbitnya laporan audit.

Scheduling lag menunjukkan bahwa jangka waktu *audit report lag* dipengaruhi oleh manajemen. Sedangkan *fieldwork lag* dan *reporting lag* menunjukkan peran auditor yang bertanggung jawab dalam melakukan proses pekerjaan lapangan hingga pembuat laporan audit, yang menyebabkan adanya *audit report lag*.

Menurut Gozali dan Harjanto (2020), *audit delay* dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal laporan audit} - \text{Tanggal tutup buku} \quad (2.1)$$

Keterangan:

Audit Delay : rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan

Tanggal laporan audit : tanggal yang tertera pada laporan auditor independen

Tanggal tutup buku : tanggal tutup buku perusahaan

2.5 Opini Audit

Menurut Ardiyos (2007) dalam Normalita, *et al.* (2020), opini *audit* adalah suatu laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya dari kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan. Laporan *audit* adalah alat *formal* yang digunakan *auditor* dalam mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pendapat *auditor* sangat penting bagi perusahaan atau pihak-pihak lain yang membutuhkan hasil dari laporan keuangan auditan. *Auditor* sebagai pihak yang independen di dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan, yang nantinya akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya (Aprilliant, *et al.*, 2020).

Menurut IAPI (2021) dalam SA 700, tujuan auditor adalah untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh dan untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis. Dalam penelitian ini, opini *audit* diukur menggunakan variabel *dummy*. Angka 1 (satu) menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan opini *audit* wajar tanpa pengecualian dan angka 0 (nol) menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan opini *audit* selain wajar tanpa pengecualian.

Menurut IAPI (2021) dalam SA 700 bentuk opini audit terdiri dari:

1. Opini tanpa Modifikasian

Auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian ketika *auditor* menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

2. Opini dengan Modifikasian

Ketika *auditor* menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material, atau tidak dapat memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari

kesalahan penyajian material, *auditor* harus memodifikasi opininya dalam laporan *auditor* berdasarkan SA 705. Dalam SA 705, IAPI (2021) menyatakan tujuan *auditor* adalah untuk menyatakan dengan jelas suatu opini yang dimodifikasi dengan tepat atas laporan keuangan yang diperlukan ketika *auditor* menyimpulkan, berdasarkan bukti *audit* yang diperoleh, bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material atau *auditor* tidak dapat memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material.

Menurut IAPI (2021) dalam SA 705, terdapat 3 (tiga) tipe opini tanpa modifikasian, yaitu opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan pendapat. Keputusan tentang ketepatan pengguna tipe opini modifikasian bergantung pada:

- a. Sifat dari hal-hal yang menyebabkan dilakukannya modifikasi, yaitu apakah laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material atau, dalam hal ketidakmampuan untuk memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat, kemungkinan mengandung kesalahan penyajian material.
- b. Pertimbangan *auditor* tentang seberapa pervasif dampaknya atau kemungkinan dampak hal-hal tersebut terhadap laporan keuangan.

Penentuan tipe modifikasi terhadap opini *auditor* berdasarkan IAPI (2021) dalam SA 705, yaitu:

- a. Opini Wajar dengan Pengecualian

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:

1. *Auditor*, setelah memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregat, adalah material, tetapi tidak pervasive, terhadap laporan keuangan; atau
2. *Auditor* tidak dapat memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi *auditor* menyimpulkan bahwa kemungkinan

dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika relevan, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif.

b. Opini Tidak Wajar

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika *auditor*, setelah memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregat, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

c. Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika *auditor* tidak dapat memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan *auditor* menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika relevan, dapat bersifat material dan pervasif. *Auditor* tidak boleh menyatakan pendapat ketika, dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian, *auditor* menyimpulkan bahwa, meskipun telah memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, *auditor* tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan.

2.6 Pengaruh Opini Audit Terhadap *Audit Delay*

Opini yang dihasilkan oleh *auditor* dapat mempengaruhi lama dari keluarnya laporan audit (Regilia, 2018). Menurut Yanthi, *et al.* (2020), bagi pihak internal dan eksternal perusahaan, opini *auditor* atas laporan keuangan dapat digunakan sebagai tolak ukur dan untuk mengetahui kinerja perusahaan selama periode tertentu sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Perusahaan yang menerima *unqualified opinion* akan melaporkan laporan keuangan *audit* dengan tepat waktu. Siahaan, *et al.* (2019) menyatakan, opini *unqualified* menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Darmawan (2018) mengemukakan, *auditor* akan memberikan opini tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. *Auditor* akan memberikan pendapat tidak wajar jika dibatasi lingkup auditnya sehingga *auditor* tidak dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya.

Sari dan Mulyani (2019) mengemukakan perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) akan lebih singkat *audit delay* nya dibandingkan perusahaan yang memperoleh opini selain wajar tanpa pengecualian. Hal ini terjadi karena proses pemberian pendapat selain wajar tanpa pengecualian melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner *audit* yang lebih senior atau staf teknis lainnya dan perluasan lingkup audit.. Aryaningsih dan Budhiarta (2014) dalam Puryati (2020) menyatakan ketika perusahaan mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian maka auditor akan mencari bukti-bukti penyebab dikeluarkannya opini selain wajar tanpa pengecualian. Pencarian bukti-bukti serta temuan audit akan memakan banyak waktu sehingga mengindikasikan panjangnya *audit delay*. Apabila perusahaan menghadapi posisi yang kurang memenuhi syarat tersebut, maka perlu dilakukan proses *audit* yang lebih detail untuk menelusuri bukti pendukung yang dapat memenuhi syarat sebagai *unqualified opinion* (Lestari dan Nuryatno, 2018)

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat kesimpulan mengenai pengaruh opini audit terhadap *audit delay*. Hasil penelitian yang dilakukan Annisa (2018), Lestari dan Nuryatno (2018), Siahaan, et al. (2019), dan Puryati (2020) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun berbeda dengan penelitian Adiraya dan Sayidah (2018), Yanthi, et al. (2020) dan Saputra, et al. (2020) yang menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif untuk penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

Ha₁: Opini *audit* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.7 Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam periode jangka panjang (Weygandt, *et al.*, 2019). Menurut Saragih (2018), solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya. Dalam penelitian ini, solvabilitas diukur menggunakan *Debt to Assets Ratio (DAR)*. Menurut Kasmir (2017), *Debt to Assets Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk melihat atau membandingkan total utang yang dimiliki perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan, atau dengan kata lain yaitu melihat berapa besar aktiva perusahaan yang didanai oleh utang. Menurut Weygandt, *et al.* (2019), rumus solvabilitas sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}} \times 100\% \quad (2.2)$$

Keterangan:

DAR : *Debt to Asset Ratio*

Total Liabilities : Jumlah utang yang dimiliki perusahaan

Total Asset : Jumlah aset yang dimiliki perusahaan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2020) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 57, liabilitas adalah kewajiban kini entitas, timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Kewajiban kini timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu hanya jika:

1. Entitas telah memperoleh manfaat ekonomik atau mengambil tindakan; dan
2. Sebagai konsekuensinya, entitas akan atau mungkin harus mengalihkan sumber daya ekonomik yang tidak akan dialihkan jika entitas tidak memperoleh manfaat ekonomik atau mengambil tindakan tersebut.

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika terdapat kemungkinan besar bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal (IAI, 2020).

Menurut Weygandt, *et al.* (2019), liabilitas dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. *Current liability*, merupakan utang perusahaan yang diperkirakan akan dibayar dalam jangka waktu satu tahun atau dalam siklus operasional perusahaan. *Current liability* terdiri dari utang usaha, *notes payable*, *value-added taxes payable*, *sales taxes payable*, pendapatan diterima di muka, upah dan gaji karyawan, dan *current maturities of long-term debt*.
2. *Non-current liability*, merupakan utang perusahaan yang diperkirakan akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. *Non-current liability* terdiri dari obligasi, *long-term notes payable*, dan *lease liabilities*.

Menurut IAI (2019) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1, entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

1. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitass tersebut dalam siklus operasi normal;
2. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menanggihkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrument ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019) dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK), aset adalah sumber daya ekonomik kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Sumber daya ekonomik adalah hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomik.

Sumber daya ekonomik dapat menghasilkan manfaat ekonomik bagi entitas dengan memberi hak tau memungkinkannya untuk melakukan, misalnya satu atau lebih dari hal berikut:

1. Menerima arus kas kontraktual atau sumber daya ekonomik lainnya;
2. Menukarkan sumber daya ekonomik dengan pihak lain dengan persyaratan yang menguntungkan;
3. Menghasilkan arus kas masuk atau menghindarkan arus kas keluar, misalnya:
 - a. Menggunakan sumber daya ekonomik baik secara individu atau dalam kombinasi dengan sumber daya ekonomik lainnya untuk menghasilkan barang atau menyediakan jasa;
 - b. Menggunakan sumber daya ekonomik untuk meningkatkan nilai sumber daya ekonomik lainnya; atau
 - c. Meyewakan sumber daya ekonomik ke pihak lain.
4. Menerima kas atau sumber daya ekonomik lainnya dengan menjual sumber daya ekonomik; atau
5. Mengakhiri liabilitas dengan mengalihkan sumber daya ekonomik.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019) dalam PSAK 1, aset terdiri dari 2 (dua) yaitu:

1. Aset Lancar
Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancer, jika:
 - a. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
 - b. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
 - c. Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
 - d. Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.
2. Aset tidak lancer

Pernyataan menggunakan istilah tidak lancar untuk mencakup aset tetap, aset tak berwujud, dan asset keuangan yang bersifat jangka panjang.

Menurut Zulkarnaen (2018), semakin tinggi rasio *debt to asset ratio* berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Menurut Lianto dan Kusuma (2010) dalam Soedarsa dan Nurdiawansyah (2017) proporsi relatif dari hutang terhadap total aset mengindikasikan kondisi keuangan dari perusahaan. Proporsi yang besar dari hutang terhadap total aktiva akan meningkatkan kecenderungan kerugian dan dapat meningkatkan kehati-hatian *auditor* terhadap laporan keuangan yang akan diaudit. Hal ini disebabkan karena tingginya proporsi dari hutang akan meningkatkan pula risiko keuangannya.

2.8 Pengaruh Solvabilitas Terhadap Audit Delay

Saputra, *et al.* (2020) menyatakan bahwa laporan hasil auditing bergantung pada lamanya proses pemeriksaan yang dilakukan auditor terhadap tingkat besar kecilnya utang. Hal ini dikarenakan besar kecilnya utang harus dikonfirmasi oleh pihak auditor melalui surat konfirmasi dan auditor perlu menelusuri lebih lanjut jika terdapat perbedaan antara pencatatan dengan hasil konfirmasi yang diterima. Zulkarnaen (2018) menyatakan bahwa nilai rasio yang tinggi menunjukkan peningkatan dari rasio yang tinggi dan menunjukkan peningkatan dari resiko pada kreditor berupa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya.

Menurut Effendi (2018), rasio utang yang tinggi terhadap total aset dapat berdampak pada kurangnya kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya. Tingginya solvabilitas dapat berakibat auditor memerlukan waktu yang lebih banyak dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya sehingga berdampak pada *audit delay*.

Perusahaan yang memiliki *DAR* yang tinggi menggambarkan kondisi perusahaan yang kurang baik atau gagal dalam meningkatkan fokus auditor bahwa laporan keuangan kurang *reliable*. Hal ini karena tingginya *DAR* secara normal berhubungan dengan tingginya resiko. Ini merupakan hasil dari kesehatan finansial perusahaan yang buruk dimana mungkin terjadi karena manajemen yang buruk dan *fraud*. Fokus auditor dalam hal ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melaksanakan proses audit karena harus mengumpulkan alat bukti yang lebih kompeten untuk meyakinkan kewajaran laporan keuangannya (Okalesa, 2018). Menurut Saragih (2018), tingginya utang yang dimiliki oleh perusahaan mengindikasikan adanya keterlambatan pada penyusunan laporan audit karena adanya tingkat utang yang terlalu tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut mendapatkan masalah dan tidak berjalan secara efektif sehingga dapat memperpanjang *audit delay*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat kesimpulan mengenai pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*. Hasil penelitian yang dilakukan Saragih (2018), Effendi (2018), dan Okalesa (2018) menunjukkan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Gozali dan Harjanto (2020), Clarisa dan Pangerapan (2019), dan Saputra, *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa solvabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif untuk penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

Ha₂: Solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

2.9 Kepemilikan Institusional

Suparsada dan Putri (2017) dalam Gozali dan Harjanto (2020) menyatakan kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan

mendorong tingkat pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Purba dan Effendi, 2019). Menurut IAI (2018) dalam PSAK 7, personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung dan tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris dari entitas. Menurut Hery (2019), dewan komisaris mewakili pemegang saham dalam mengawasi jalannya kegiatan entitas yang dilakukan atau dikelola manajemen. Dewan komisaris berperan penting dalam memastikan bahwa manajemen telah mengimplementasikan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan secara layak. Untuk membantu melakukan pengawasan terhadap manajemen, dewan membentuk komite audit yang diberikan tanggung jawab dalam mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen.

Menurut Suparsada dan Putri (2017) dalam Gozali dan Harjanto (2020), rumus kepemilikan institusional sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Total saham perusahaan yang beredar}} \times 100\% \quad (2.3)$$

Keterangan:

Kepemilikan institusional: saham yang dimiliki institusi lain

Menurut Weygandt, *et al.* (2019), ketika perusahaan memiliki izin, perusahaan dapat menjual hak kepemilikan dalam bentuk saham. Terdapat 3 (tiga) jenis saham, yaitu:

1. *Ordinary shares*

Ketika perusahaan hanya memiliki satu tipe saham, saham tersebut merupakan *ordinary shares*. Hak-hak pemegang *ordinary shares*:

- a. Memberikan hak suara dalam pemilihan anggota dewan direksi dalam rapat tahunan dan memberikan hak suara dalam kegiatan perusahaan yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham.
 - b. Mendapatkan pembagian laba dalam bentuk dividen.
 - c. Mempertahankan persentase kepemilikan dengan membeli saham baru saat diterbitkan.
 - d. Mendapatkan selisih aset pada saat perusahaan likuidasi. Hal ini disebut *residual claim* karena pemilik dibayar dengan aset yang tersisa setelah melakukan pembayaran atas seluruh liabilitas.
2. *Preference shares*
- Preference shares* memiliki ketentuan kontrak yang memberi pemegang saham beberapa preferensi atau prioritas di atas pemegang *ordinary shares*. Pemegang *preference shares* memiliki prioritas untuk memperoleh distribusi pendapatan (dividen) dan aset jika terjadi likuidasi. Namun, pemegang *preference shares* pada umumnya tidak memiliki hak untuk memberikan suara.
3. *Treasury shares*
- Treasury shares* adalah saham milik perusahaan yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan dari pemegang saham tetapi tidak diretired. Perusahaan melakukan pembelian kembali saham dengan alasan berikut:
- a. Membagikan saham kepada karyawan sebagai bonus atau kompensasi dalam bentuk saham
 - b. Memberikan tanda kepada pasar bahwa harga saham *underpriced*, dengan harapan meningkatkan harga saham tersebut
 - c. Memperoleh jumlah saham tambahan untuk digunakan dalam akuisisi perusahaan lain
 - d. Mengurangi jumlah saham beredar yang berpengaruh pada peningkatan *earnings per share*

Menurut Weygandt, *et al.* (2019), dalam melakukan penerbitan saham terdapat beberapa pertimbangan, yaitu:

1. *Authorized Shares*

Authorized shares merupakan jumlah lembar saham maksimal yang dapat diterbitkan selama perusahaan berdiri.

2. *Issuance of Shares*

Perusahaan dapat melakukan penerbitan saham secara langsung kepada *investor*. Sebagai alternatif, perusahaan juga dapat menerbitkan saham secara tidak langsung melalui perusahaan investasi perbankan yang khusus dalam membawa sekuritas ke calon *investor*. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga saham yang akan diterbitkan, yaitu:

- a. Antisipasi pendapatan di masa mendatang.
- b. Tingkat dividen per saham yang diharapkan.
- c. Posisi keuangan perusahaan pada saat ini.
- d. Kondisi ekonomi pada saat ini.
- e. Kondisi pasar sekuritas pada saat ini.

3. *Market Price of Shares*

Saham yang dimiliki perusahaan terbuka diperdagangkan di bursa yang terorganisir. Interaksi antara penjual dan pembelian menentukan harga per lembar saham. Pada dasarnya, harga saham ditetapkan oleh pasar dan cenderung mengikuti pendapatan dan dividen perusahaan. Namun, faktor-faktor di luar kendali perusahaan dapat mempengaruhi harga pasar saham yang mengalami fluktuasi setiap harinya.

4. *Par and No-Par Value Shares*

Par value shares adalah saham biasa dimana *charter* telah menetapkan harga per lembar saham. *No-par value shares* adalah saham biasa dimana *charter* belum menetapkan harga.

Menurut Weygandt, *et al.* (2019), *share investments* adalah penyertaan saham pada perusahaan lain. Ketika sebuah perusahaan memiliki saham (dan/atau hutang) dari beberapa perusahaan yang berbeda, kelompok sekuritas tersebut diidentifikasi sebagai portofolio investasi. Akuntansi untuk investasi dalam saham tergantung pada sejauh mana pengaruh investor atas urusan operasi dan keuangan

perusahaan penerbit. Perusahaan diharuskan untuk menggunakan penilaian alih-alih mengikuti pedoman, yaitu:

1. Kepemilikan kurang dari 20% (*insignificant*)

Dalam akuntansi, kepemilikan kurang dari 20% dicatat menggunakan metode biaya. Dalam metode biaya, perusahaan mencatat *investment* sebagai biaya, dan mengakui pendapatan hanya ketika *cash dividends* diterima.

2. Kepemilikan 20%-50% (*significant*)

Ketika investor perusahaan hanya memiliki kepemilikan *ordinary shares* yang kecil terhadap perusahaan lain, investor tidak dapat kontrol atas perusahaan *investee*. Ketika kepemilikan *ordinary shares* berada di antara 20%-50%, maka investor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas keuangan dan operasional perusahaan *investee*. Ketika investor hanya memiliki pengaruh yang signifikan tetapi bukan kontrol atas perusahaan *investee*, maka hal ini mengacu pada *investee* sebagai *associate*. Perusahaan asosiasi dalam arti tertentu menjadi bagian dari perusahaan investor.

Dalam metode ekuitas, investor mencatat bagiannya atas laba bersih perusahaan asosiasi pada tahun perolehannya. Dalam metode ini, perusahaan investor awalnya mencatat investasi awalnya mencatat investasi dalam saham biasa entitas asosiasi pada biaya perolehan. Setelah itu, investor menyesuaikan akun investasi setiap tahun untuk menunjukkan ekuitas investor di asosiasi. Setiap tahun, investor melakukan hal berikut, meningkatkan (debit) akun investasi dan meningkatkan pendapatan (kredit) untuk bagiannya dari laba bersih perusahaan asosiasi. Investor juga mengurangi (mengkreditkan) akun investasi sejumlah dividen yang diterima. Akun investasi dikurangi untuk dividen yang diterima karena pembayaran dividen mengurangi aset bersih entitas asosiasi.

3. Kepemilikan lebih dari 50% (*controlling*)

Perusahaan yang memiliki kepemilikan lebih dari 50% *ordinary shares* perusahaan lain disebut sebagai *parent company*. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk disebut sebagai anak perusahaan. Oleh karena kepemilikannya, perusahaan induk memiliki kepentingan pengendalian dalam

perusahaan anak. Ketika perusahaan memiliki lebih dari 50% *ordinary shares* perusahaan lain, pada umumnya perusahaan akan membuat laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan ini mencerminkan total aset dan liabilitas yang dikendalikan oleh perusahaan induk. Laporan keuangan ini juga menunjukkan total pendapatan dan beban yang dimiliki oleh perusahaan anak. Perusahaan mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian sebagai tambahan atas laporan keuangan untuk perusahaan induk dan perusahaan anak. Laporan keuangan konsolidasian berguna bagi *shareholders*, dewan direksi, dan manajer perusahaan induk. Laporan ini menunjukkan besaran dan ruang lingkup operasi entitas sependangali.

2.10 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Audit Delay*

Asnawi, *et al.* (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Menurut Asnawi, *et al.* (2019) kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Rosalia (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional melihat seberapa jauh perusahaan taat pada peraturan yang mendorong tingkat pengawasan yang lebih optimal.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistis (Purba dan Effendi, 2019). Kepemilikan saham oleh pihak luar atau pihak institusi mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan segera karena laporan keuangan yang diserahkan terlambat akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai informasi tersebut (Setiawati, *et al.*, 2021). Utomo dan Sawitri (2021) mengemukakan besarnya kepemilikan institusional akan mendorong perusahaan untuk segera

melaporkan laporan keuangan. Semakin besar kepemilikan institusional akan membuat risiko pengendalian rendah menyebabkan auditor tidak perlu memperluas lingkup audit sehingga audit delay pendek (Gozali dan Harjanto, 2020). Menurut Ovami dan Lubis (2018) adanya saham yang dimiliki oleh pihak institusi lain dapat menuntut penyelesaian laporan keuangan audit dengan segera karena *investor* institusional yang menanamkan sahamnya memiliki potensi untuk memengaruhi kegiatan manajemen secara langsung melalui kepemilikan saham mereka di perusahaan tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat kesimpulan mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *audit delay*. Hasil penelitian yang dilakukan Gozali dan Harjanto (2020), dan Rosalia, *et al.* (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Utomo dan Sawitri (2021) dan Kristanti (2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif untuk penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

Ha₃: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.11 Audit Tenure

Menurut Yanthi, *et al.* (2020), *audit tenure* merupakan jumlah tahun dimana KAP melakukan perikatan audit pada perusahaan yang sama. *Auditor* yang memiliki masa perikatan cukup lama dengan klien dapat mendorong meningkatnya pemahaman auditor atas operasi, risiko bisnis, serta sistem akuntansi perusahaan sehingga menghasilkan proses audit yang lebih efisien. Hal ini dapat membantu auditor dalam merancang program audit yang lebih efektif dan laporan audit yang berkualitas tinggi.

Menurut Tantama dan Yanti (2018), *audit tenure* diukur dengan menghitung jumlah tahun dimana Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama telah melakukan perikatan audit terhadap klien. Tahun pertama perikatan dimulai dengan angka 1

(satu) dan ditambah dengan satu (+1) untuk tahun-tahun berikutnya di laporan auditor independen yang sama, bila terdapat berbeda KAP dalam tahun ke 3 atau 4 berdasarkan tahun penelitian maka hitungan akan kembali menjadi angka 1 selama beberapa tahun untuk memastikan lamanya auditor KAP yang mengaudit perusahaan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 mengatur mengenai Praktik Akuntan Publik. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 dinyatakan:

1. Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut.
2. Entitas sebagaimana dimaksud terdiri atas industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun, perusahaan asuransi/ reasuransi, dan badan usaha milik negara.
3. Pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi.
4. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ POJK.03/ 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, KAP dapat dikategorikan sebagai KAP yang sama dalam hal:

1. Nama KAP tidak berubah dan tidak terjadi perubahan komposisi AP lebih dari 50% (lima puluh persen) atau lebih; atau
2. Terdapat pendirian atau perubahan nama KAP namun komposisi AP 50% (lima puluh persen) atau lebih berasal dari KAP yang sebelumnya.

2.12 Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap *Audit Delay*

Menurut Annisa (2018), lama masa jabatan KAP mempengaruhi *audit delay* dikarenakan pemahaman atas karakteristik bisnis klien, dengan *tenure* yang panjang diharapkan memiliki pemahaman dan pengetahuan atas karakteristik bisnis industri perusahaan klien, sehingga dapat mengurangi potensi kegagalan audit dan meningkatkan efisiensi audit, yang kemudian menghasilkan *audit delay* semakin pendek. Yanthi, *et al.* (2020) menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik dengan *tenure* selama lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun menghasilkan *audit delay* yang lebih pendek dibandingkan KAP dengan *tenure* pendek. Dalam mengaudit laporan keuangan klien, auditor masih membutuhkan pembelajaran dalam beradaptasi dengan karakteristik bisnis dan sistem pencatatan klien, sehingga proses pemahaman dilakukan dengan optimal, sedangkan KAP yang memiliki *tenure* panjang dinilai bahwa KAP telah memiliki pengetahuan yang cukup dihasilkan dari perikatan audit dengan klien yang sudah berjalan relatif lama.

Menurut Tantama dan Yanti (2018), hal tersebut juga dapat menciptakan terjadinya kesiapan auditor dalam melakukan audit secara efektif dan efisien. Dengan adanya perikatan yang lama diharapkan mengurangi risiko kegagalan audit dan keterlambatan dalam memberikan hasil laporan keuangan yang telah diaudit. Oleh sebab itu, dibutuhkan hubungan khusus antara auditor dengan bisnis klien. Dengan tujuan untuk memahami karakteristik dan ruang lingkup perusahaan.

Menurut Daratika (2018) semakin meningkat *audit tenure* maka pemahaman *auditor* atas operasi, resiko bisnis, serta sistem akuntansi perusahaan akan ikut meningkat sehingga menghasilkan proses *audit* yang lebih efisien. Sebaliknya jika *auditor* melakukan perikatan *audit* pada klien baru maka jangka waktu penyelesaian *audit* akan lebih panjang. Hal ini disebabkan *auditor* memerlukan waktu lebih lama untuk dapat beradaptasi dengan pencatatan, kegiatan operasional, kendali intern, serta kertas kerja periode lalu perusahaan pada awal perikatan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat kesimpulan mengenai pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay*. Hasil penelitian yang dilakukan Tantama dan

Yanti (2018), Annisa (2018), dan Yanthi, et al. (2020) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun berbeda dengan penelitian Pratiwi dan Wiratmaja (2018) dan Sihombing (2021) yang menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif untuk penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

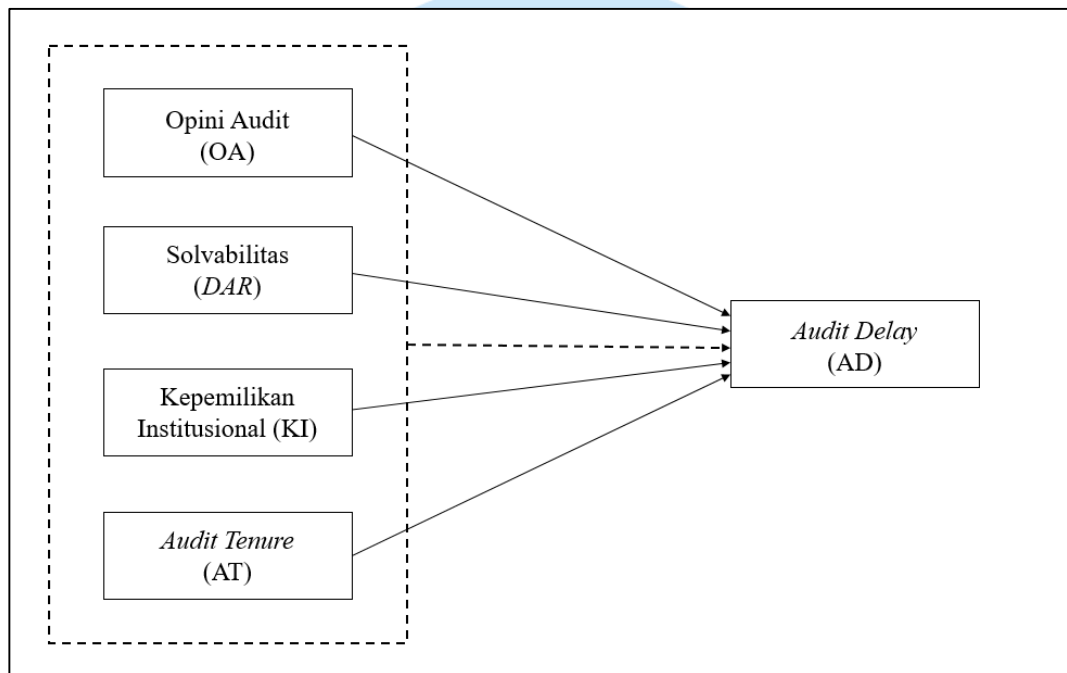
Ha4: *Audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.13 Pengaruh Opini Audit, Solvabilitas, Kepemilikan Institusional, dan *Audit Tenure* Secara Simultan Terhadap *Audit Delay*

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh opini audit, kepemilikan institusional, solvabilitas, dan *audit tenure* terhadap *audit delay*. Hasil penelitian tersebut antara lain merupakan penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan, jenis opini auditor, ukuran KAP, dan *audit tenure* secara simultan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian yang dilakukan Saragih (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan, solvabilitas, dan komite audit secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian yang dilakukan Gozali dan Harjanto (2020) menyatakan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan solvabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanthi, et al. (2020) menyatakan bahwa *audit tenure*, ukuran kantor Akuntan Publik, pergantian auditor, dan opini audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian yang dilakukan Utomo dan Sawitri (2021) menunjukkan KAP *big four*, komite audit, dan kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*".

2.14 Model Penelitian

Model penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA